

ANALISI RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI, RASIO KEMANDIRIAN, DAN ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI, RASIO KEMANDIRIAN, DAN RASIO KESERASIAN UNTUK PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DI KOTA MANADO

Bavelly Augracesya Cheryll¹, Anderson G. Kumenaung², George M. V. Kawung³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

E-mail: Bavellyaugracesya@Gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Manado sebagai entitas pemerintah daerah dituntut untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, mandiri, dan serasi guna mencapai tujuan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado dengan menggunakan empat rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan keserasian, dalam kurun waktu 2018 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Manado serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi di tahun 2018 dan 2019 yang tergolong sangat efektif, namun menurun drastis pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Rasio efisiensi menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efisien di beberapa tahun, namun perlu peningkatan dalam optimalisasi belanja. Sementara itu, rasio kemandirian mengindikasikan ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, meskipun terdapat tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio keserasian belanja menunjukkan dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal, yang menandakan alokasi anggaran masih lebih besar untuk kegiatan rutin daripada pembangunan. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan strategi pengelolaan keuangan daerah agar lebih mandiri, efisien, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Kata Kunci: Kinerja keuangan daerah, APBD, Pembangunan daerah

ABSTRACT

A good regional financial management is an important factor in supporting the success of development and improving community welfare. Manado City Government as a local government entity is required to manage the Regional Budget (APBD) effectively, efficiently, independently, and harmoniously in order to achieve the objectives of regional autonomy. This study aims to analyze the financial performance of Manado City Government using four financial ratios, namely effectiveness, efficiency, independence, and harmony ratios, in the period 2018 to 2023. This research uses a quantitative descriptive approach with secondary data obtained from the Manado City Budget Realization Report (LRA) and data from the Central Statistics Agency (BPS). The results showed that the effectiveness ratio fluctuated, with the highest achievements in 2018 and 2019 which were classified as very effective, but decreased dramatically in 2020 due to the impact of the COVID-19 pandemic. The efficiency ratio shows that budget management is quite efficient in some years, but needs to be improved in optimizing spending. Meanwhile, the independence ratio indicates a high dependence on transfer funds from the central government, despite an increasing trend in regional own-source revenue (PAD). The expenditure compatibility ratio shows the dominance of operational expenditure over capital expenditure, indicating that budget allocations are still greater for routine activities than for capital expenditure.

Keywords: Regional Financial Performance, APBD, Regional development

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peran penting sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, sekaligus evaluasi pembangunan daerah. Keberhasilan pengelolaan APBD mencerminkan kinerja keuangan daerah, yang pada akhirnya menentukan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja keuangan daerah umumnya diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, antara lain rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio keserasian. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio efisiensi digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu mengelola belanja daerah sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Rasio kemandirian mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya tanpa bergantung pada dana transfer, sedangkan rasio keserasian menggambarkan proporsi belanja operasi dan belanja modal dalam struktur APBD (Mahmudi, 2016; Kuwatu, 2019). Keempat rasio ini penting sebagai indikator untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara menghadapi dinamika pengelolaan keuangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Realisasi pendapatan dan belanja daerah selama periode 2018–2023 menunjukkan adanya fluktuasi baik dari sisi penerimaan maupun alokasi belanja.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2018–2023

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	PAD (Rp)	% PAD terhadap Pendapatan	Belanja Daerah (Rp)	% Belanja operasi	% Belanja modal
2018	1.476.076.630.090,00	303.987.180.681,00	21%	1.475.206.368.083,00	91%	18%
2019	1.484.146.040.925,00	352.201.137.704,00	24%	1.471.650.913.893,00	101%	12%
2020	1.370.055.923.474,00	261.756.116.854,90	19%	1.361.234.370.982,00	90%	10%
2021	1.330.527.539.524,30	298.070.315.115,00	22%	1.322.303.695.268,00	91%	12%
2022	1.518.581.906.124,00	392.223.184.451,00	26%	1.697.267.679.056,00	88%	29%
2023	1.506.315.447.288,00	408.408.994.078,00	27%	1.494.474.261.944,00	100%	14%

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Kota Manado, 2018–2023

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, yang salah satunya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, namun kembali meningkat pada 2022. PAD juga mengalami tren positif, meningkat dari Rp261 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp408 miliar pada tahun 2023. Akan tetapi, porsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 19–27%. Dari sisi belanja, belanja operasi sangat dominan hingga mencapai 100% pada tahun 2023, sementara belanja modal relatif rendah, dengan kisaran 10–29%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengeluaran masih lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan rutin dibandingkan investasi pembangunan jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado dengan menggunakan keempat indikator rasio tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan keserasian pengelolaan APBD menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Kota Manado berdasarkan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada tahun 2018-2023?
2. Bagaimana kinerja keuangan Kota Manado berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2018-2023?
3. Bagaimana kinerja keuangan Kota Manado berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2018-2023?
4. Bagaimana kinerja keuangan Kota Manado berdasarkan Rasio Keserasian Belanja Daerah pada tahun 2018-2023?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk seluruh kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Amin,

2017). Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 2022). PAD menjadi indikator kemandirian fiskal suatu daerah karena semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD, semakin kuat pula kemampuan daerah membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah (UU No. 17 Tahun 2003). APBD berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab (Sularso & Restianto, 2011). Salah satu pendekatan penilaian adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

2.5. Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio keuangan daerah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien. Salah satu rasio yang penting adalah rasio efektivitas, yaitu ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi realisasi pendapatan dibandingkan target, maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah tersebut (Pangestu, 2022).

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target pendapatan, khususnya PAD. Rasio efisiensi mengukur perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran, di mana semakin rendah nilainya semakin efisien. Rasio kemandirian mencerminkan kemampuan daerah membiayai kegiatan pemerintahan tanpa bergantung pada dana transfer pusat, sedangkan rasio keserasian menggambarkan proporsi belanja operasi dan belanja modal agar alokasi anggaran seimbang antara kebutuhan rutin dan pembangunan jangka panjang.

2.6. Penelitian Terdahulu

Rampengan (2020) dalam penelitian berjudul " Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado" Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas dan efisiensi anggaran suatu pelaksanaan anggaran belanja dari BAPPEDA di Kota Manado. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas anggaran belanja di BAPPEDA Kota Manado pada tahun 2011-2015 bervariasi. Dan tingkat efisiensi anggaran belanja di BAPPEDA Kota Manado pada tahun 2011-2015 secara keseluruhan sudah diolah dengan baik.

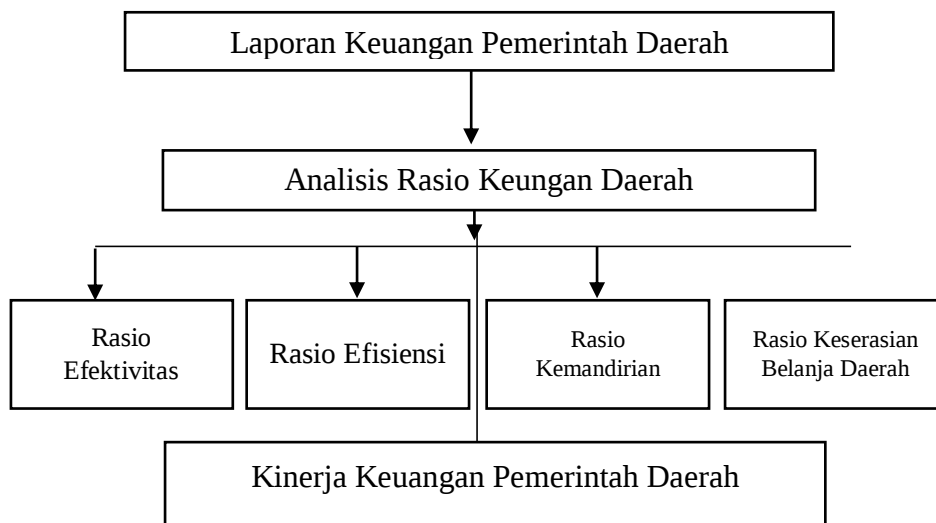
Saknosiwi (2021) dalam penelitian berjudul "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Bolaang Mongondow" Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan keuangan di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Serta dampak efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan menggunakan metode kuantitatif untuk analisis data. Dan Metode analisis deskriptif digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow melebihi 100% dari 2014-2018. Efisiensi manajemen keuangan tetap rendah karena realisasi pendapatan yang lebih rendah. Dan Pembangunan ekonomi menunjukkan peningkatan berkelanjutan di Bolaang Mongondow selama lima tahun.

Machmud (2014) dalam penelitian berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Melalui Rasio Kemandirian Keuangan daerah, Rasio efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan kinerja. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik.

2.7. Kerangka Pemikiran Teoritis

Alur pemikiran ilmiah berdasarkan teori dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui skema berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Kajian teori (diolah penulis)

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar analisis. Melalui laporan keuangan tersebut dilakukan analisis rasio keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio keserasian belanja daerah. Melalui keempat rasio tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh. Hasil analisis diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana Pemerintah Kota Manado berhasil mengelola APBD secara efektif, efisien, mandiri, dan seimbang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu Badan Pusat Statistik Kota Manado dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Manado untuk tahun anggaran 2018 hingga 2023, serta sumber data pendukung lainnya yang relevan dengan metode analisis yang diterapkan. Data yang dikumpulkan berasal dari Kota Manado dengan periode waktu yang ditentukan adalah antara tahun 2018 hingga 2023.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan.
3. Rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan belanja daerahnya dengan mengandalkan pendapatan asli daerah tanpa bergantung pada pendapatan transfer.
4. Rasio keserasian digunakan untuk menilai proporsi belanja daerah yang dialokasikan pada belanja operasional dan belanja modal guna mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menghitung Rasio Efektivitas digunakan rumus (Kuwatu 2019):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria efektivitasnya yaitu:

1. Jika hasil persentase lebih dari 100%, maka anggaran dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil persentase berada pada kisaran 90%–100%, maka anggaran dikatakan efektif.
3. Jika hasil persentase berada pada kisaran 80%–90%, maka anggaran dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil persentase berada pada kisaran 60%–80%, maka anggaran dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil persentase kurang dari 60%, maka anggaran dikatakan tidak efektif.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi mengukur besarnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima secara nyata.

Untuk menghitung Rasio Efisiensi digunakan rumus (Abdul Halim 2007):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria efisiensinya yaitu:

1. Jika persentase hasil lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikategorikan tidak efisien.
2. Jika persentase hasil berada pada kisaran 90%–100%, maka anggaran belanja dikategorikan kurang efisien.
3. Jika persentase hasil berada pada kisaran 80%–90%, maka anggaran belanja dikategorikan cukup efisien.
4. Jika persentase hasil berada pada kisaran 60%–80%, maka anggaran belanja dikategorikan efisien.
5. Jika persentase hasil kurang dari 60%, maka anggaran belanja dikategorikan sangat efisien

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian mencerminkan kapasitas suatu daerah untuk pembiayaan aktivitas pemerintahan, peningkatan sarana atau prasarana, serta pelayanan publik dengan mengandalkan pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan utama.

Untuk menghitung Rasio Efektivitas digunakan rumus (Dilliana & Herdi, 2021) :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria kemandiriannya yaitu:

1. Jika tingkat kemandirian berada pada kisaran 0%–25%, maka kemampuan keuangan daerah dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, artinya pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat.
2. Jika tingkat kemandirian berada pada kisaran 25%–50%, maka kemampuan keuangan daerah dikategorikan rendah dengan pola hubungan konsultatif, artinya pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat namun sudah mulai melakukan konsultasi dalam pengelolaan keuangan.
3. Jika tingkat kemandirian berada pada kisaran 50%–75%, maka kemampuan keuangan daerah dikategorikan sedang dengan pola hubungan partisipatif, artinya pemerintah daerah mulai berpartisipasi aktif dalam membiayai kebutuhan daerahnya.
4. Jika tingkat kemandirian berada pada kisaran 75%–100%, maka kemampuan keuangan daerah dikategorikan tinggi dengan pola hubungan delegatif, artinya pemerintah daerah telah mandiri dalam mengelola keuangannya dengan sedikit ketergantungan pada pemerintah pusat.

Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian belanja daerah merupakan salah satu alat ukur untuk menilai struktur alokasi belanja pemerintah daerah, khususnya dalam hal keseimbangan antara belanja operasi (pengeluaran rutin)

dan belanja modal (pengeluaran produktif).

Analisis ini penting untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggarannya untuk keperluan yang bersifat konsumtif atau investasi jangka panjang.

Untuk menghitung Rasio keserasian belanja operasi digunakan rumus (dalam Sriningsih, dkk 2021):

$$\text{Rasio Keserasian belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria keserasian belanja operasi yaitu:

1. Jika persentase belanja operasi berada di bawah 40%, maka kondisi keuangan daerah dikategorikan baik, artinya pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya dengan proporsi belanja operasi yang relatif kecil sehingga lebih banyak dialokasikan pada belanja pembangunan.
2. Jika persentase belanja operasi berada pada kisaran 40%–80%, maka kondisi keuangan daerah dikategorikan cukup baik, artinya pemerintah daerah masih dapat mengelola keuangan dengan cukup seimbang meskipun proporsi belanja operasinya cukup besar, namun masih memberikan ruang bagi belanja pembangunan.
3. Jika persentase belanja operasi berada pada kisaran 80%–100%, maka kondisi keuangan daerah dikategorikan kurang baik, artinya keuangan daerah sangat didominasi oleh belanja operasi sehingga ruang untuk belanja pembangunan menjadi sangat terbatas.

Untuk menghitung Rasio keserasian belanja modal digunakan rumus (dalam Sriningsih, dkk 2021):

$$\text{Rasio Keserasian belanja modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria keserasian belanja modal yaitu:

1. Jika persentase belanja modal berada pada kisaran 0%–10%, maka kondisi keuangan daerah dikategorikan kurang baik, artinya alokasi dana untuk belanja modal masih sangat rendah sehingga kemampuan daerah dalam meningkatkan aset dan pembangunan jangka panjang menjadi terbatas.
2. Jika persentase belanja modal berada pada kisaran 10%–40%, maka kondisi keuangan daerah dikategorikan cukup baik, artinya pemerintah daerah telah mampu mengalokasikan sebagian anggarannya untuk belanja modal, meskipun masih perlu ditingkatkan agar mendukung pembangunan yang lebih optimal.
3. Jika persentase belanja modal berada di atas 40%, maka kondisi keuangan daerah dikategorikan baik, artinya pemerintah daerah telah memberikan prioritas yang cukup besar pada belanja modal sehingga dapat menunjang pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Hasil Analisis dengan Metode Analisis Rasio Efektivitas

Hasil dari kajian dengan alat analisis Rasio Efektivitas sesuai pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Rasio Efektivitas pada Kota Manado Tahun 2018-2023

Tahun	Target penerimaan PAD (Rp)	Realisasi penerimaan PAD (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2018	339.080.000.000	363.180.000.000	107%	Sangat Efektif
2019	375.070.000.000	377.380.000.000	101%	Sangat Efektif
2020	443.610.000.000	261.760.000.000	59%	Tidak Efektif
2021	440.190.000.000	276.880.000.000	63%	Kurang Efektif
2022	472.590.000.000	351.830.000.000	74%	Kurang Efektif
2023	540.090.000.000	375.390.000.000	70%	Kurang Efektif

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, 2025

Berdasarkan data rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado tahun 2018 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam kinerja pencapaian target PAD. Pada tahun 2018 dan 2019, kinerja penerimaan PAD tergolong sangat efektif, dengan rasio efektivitas

masing-masing sebesar 107% dan 101%, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan optimalnya upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD saat itu.

Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis dengan rasio efektivitas hanya sebesar 59%, menandakan kinerja yang tidak efektif. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 2021 hingga 2023, capaian efektivitas mulai menunjukkan perbaikan meskipun belum kembali ke kondisi sebelum pandemi. Rasio efektivitas pada tahun 2021 mencapai 63%, kemudian naik menjadi 74% pada 2022, dan sedikit menurun menjadi 70% pada 2023. Ketiga tahun tersebut dikategorikan sebagai kurang efektif, yang mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya mendorong peningkatan realisasi PAD secara maksimal.

Hasil Analisis dengan Metode Analisis Rasio Efisiensi

Kajian melalui alat analisis Rasio Efisiensi menunjukkan hasil pengolahan data sebagai berikut:

Tabel 3 Rasio Efisiensi pada Kota Manado Tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2018	1.546.546.620.938	1.461.160.058.047	106%	Tidak Efisien
2019	1.623.078.545.157	1.533.756.309.219	106%	Tidak Efisien
2020	1.519.735.490.782	1.351.650.348.707	112%	Tidak Efisien
2021	1.303.898.141.638	1.330.527.539.524	98%	Kurang Efisien
2022	1.697.267.679.056	1.518.581.906.124	112%	Tidak Efisien
2023	1.549.615.259.602	1.556.456.910.380	100%	Tidak Efisien

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, 2025

Pada tahun 2018 dan 2019, rasio efisiensi tercatat sebesar 106%, yang menunjukkan bahwa belanja daerah melebihi pendapatan yang diperoleh, sehingga masuk dalam kategori tidak efisien. Hal serupa terjadi pada tahun 2020 dan 2022, dengan rasio masing-masing sebesar 112%, yang juga menunjukkan pengeluaran melebihi pendapatan, menandakan inefisiensi yang cukup tinggi. Satu-satunya tahun dengan status "kurang efisien" adalah tahun 2021, di mana rasio efisiensinya mencapai 98%, atau sedikit lebih rendah dari pendapatan yang tersedia, namun belum bisa dikategorikan efisien secara ideal. Pada tahun 2023, rasio efisiensi mencapai 100%, yang berarti belanja dan pendapatan daerah seimbang, namun tetap dikategorikan tidak efisien karena tidak menunjukkan adanya penghematan atau kelebihan penerimaan yang dapat digunakan untuk cadangan anggaran atau belanja prioritas lainnya.

Hasil Analisis dengan Metode Analisis Rasio Kemandirian

Melalui pengolahan data dengan analisis Rasio Kemandirian, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Rasio Kemandirian pada Kota Manado Tahun 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian	Kriteria
2018	363.177.940.171	1.461.160.058.047	25%	Instruktif
2019	377.379.618.672	1.533.756.309.219	25%	Instruktif
2020	261.756.116.855	1.351.650.348.707	19%	Instruktif
2021	292.635.793.644	1.330.527.539.524	22%	Instruktif
2022	351.829.928.685	1.518.581.906.124	23%	Instruktif
2023	408.408.994.078	1.556.456.910.380	26%	Instruktif

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, 2025

Rasio kemandirian daerah selama periode 2018-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019, rasio kemandirian berada di angka 25%, kemudian menurun menjadi 19% pada tahun 2020, yang menandakan penurunan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Setelah itu, rasio kemandirian perlahan meningkat hingga mencapai 26% pada tahun 2023. Kriteria rasio kemandirian pada periode 2018-2022 masih berada pada kategori "Instruktif", yang berarti peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam pengambilan keputusan dan pembiayaan daerah. Namun, pada tahun 2023, rasio kemandirian naik ke kategori "Konsultatif", menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan peran serta kemandirian daerah, meski masih memerlukan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam beberapa hal.

Hasil Analisis dengan Metode Analisis Rasio Kerasasian Belanja Daerah

Hasil analisis dengan menggunakan Rasio Kerasasian setelah dilakukan pengolahan data adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rasio kerasasian belanja operasi pada Kota Manado Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Kerasasian Belanja Operasi	Kriteria
2018	1.498.258.573.727	1.546.546.620.938	97%	Kurang Baik
2019	1.645.361.560.887	1.623.078.545.157	101%	Kurang Baik
2020	1.352.407.995.500	1.519.735.490.782	89%	Kurang Baik
2021	1.234.121.619.277	1.322.303.695.268	93%	Kurang Baik
2022	1.488.572.451.117	1.697.267.679.056	88%	Kurang Baik
2023	1.553.786.250.139	1.549.615.259.602	100%	Kurang Baik

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kerasasian belanja daerah pada Kota Manado tahun 2018–2023, terlihat bahwa proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah berada pada kisaran 88% hingga 101%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa porsi belanja operasi jauh lebih besar dibandingkan belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah seperti belanja pegawai, barang, dan jasa, sementara alokasi untuk pembangunan jangka panjang relatif kecil.

Tabel 6 Rasio kerasasian belanja modal pada Kota Manado Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Kerasasian Belanja Modal	Kriteria
2018	288.819.124.007	1.546.546.620.938	19%	Cukup Baik
2019	242.926.530.191	1.623.078.545.157	15%	Cukup Baik
2020	146.704.780.050	1.519.735.490.782	10%	Cukup Baik
2021	171.405.913.725	1.322.303.695.268	13%	Cukup Baik
2022	484.832.027.194	1.697.267.679.056	29%	Cukup Baik
2023	272.644.202.315	1.549.615.259.602	18%	Cukup Baik

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil analisis rasio kerasasian belanja modal dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal berfluktuasi setiap tahunnya dengan persentase yang sebagian besar berada di kategori "Cukup Baik". Pada tahun 2018, rasio belanja modal mencapai 19%, namun menurun pada tahun 2019 menjadi 15% dan mencapai titik terendah pada tahun 2020, yaitu 10%, yang dikategorikan sebagai "Kurang Baik". Setelah itu, rasio mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 sebesar 13%, dan melonjak signifikan pada tahun 2022 menjadi 29%, yang merupakan angka tertinggi selama periode analisis. Pada tahun 2023, rasio kembali turun menjadi 18%.

4.2. Pembahasan

Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurut teori keuangan daerah, rasio efektivitas di atas 100% menandakan kinerja sangat efektif, sedangkan rasio 90–100% dinilai efektif, dan di bawah 80% termasuk tidak efektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas Kota Manado cukup fluktuatif. Pada 2018–2019, PAD melampaui target sehingga masuk kategori sangat efektif, namun pada 2020 rasio ini turun drastis karena dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa, yang merupakan penyumbang PAD terbesar.

Fluktuasi efektivitas PAD menunjukkan bahwa Kota Manado belum memiliki basis pendapatan yang stabil. Secara teori, penguatan efektivitas PAD tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga strategi intensifikasi (peningkatan kepatuhan dan optimalisasi pemungutan pajak) serta ekstensifikasi (pengembangan sumber pajak dan retribusi baru). Rendahnya efektivitas pada tahun tertentu juga menandakan kurang optimalnya estimasi target PAD yang ditetapkan.

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola belanja untuk menghasilkan pendapatan. Secara teori, rasio efisiensi di bawah 90% dianggap efisien, sementara di atas

100% menunjukkan adanya pemborosan atau ketidakhematan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Manado pada beberapa tahun mencatat rasio efisiensi di atas 100%, yang berarti anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Ketidakefisienan anggaran ini salah satunya disebabkan dominasi belanja rutin dibandingkan belanja produktif. Menurut teori value for money, belanja publik harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan menghasilkan manfaat jangka panjang, bukan sekadar untuk membiayai administrasi birokrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap struktur belanja Kota Manado.

Ketidakefisienan sering muncul karena kurangnya penerapan performance-based budgeting, di mana penganggaran tidak dikaitkan secara jelas dengan target kinerja. Jika belanja tidak dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai, maka penggunaan anggaran cenderung kurang efektif. Pemerintah Kota Manado perlu memperbaiki perencanaan anggaran agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Ketidakefisienan juga diperburuk oleh menurunnya pendapatan selama pandemi, sementara belanja daerah meningkat untuk mendukung sektor kesehatan dan sosial. Hal ini membuat rasio efisiensi tampak tinggi, meskipun sebagian anggaran dialokasikan untuk kebutuhan mendesak.

Analisis Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menilai kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dari PAD tanpa mengandalkan dana transfer pusat. Menurut teori desentralisasi fiskal, rasio kemandirian di bawah 25% menunjukkan pola hubungan instruktif, artinya pemerintah pusat masih sangat dominan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kota Manado masih berada di kategori ini selama periode 2018–2022, dengan sedikit perbaikan pada 2023 yang naik ke pola konsultatif.

Rendahnya kemandirian menunjukkan bahwa PAD belum menjadi sumber pendapatan utama. Pemerintah Kota Manado masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang membuat fleksibilitas dalam pembiayaan program pembangunan menjadi terbatas.

Analisis rasio keserasian belanja daerah

Rasio keserasian belanja digunakan untuk menilai seimbang atau tidaknya alokasi anggaran antara belanja operasi (belanja rutin) dan belanja modal (belanja pembangunan). Menurut teori penganggaran publik, belanja operasi meliputi biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan administrasi sehari-hari, seperti gaji pegawai, biaya pemeliharaan, dan operasional kantor. Sebaliknya, belanja modal merupakan investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana publik, dan fasilitas layanan masyarakat. Idealnya, proporsi belanja modal mencapai sekitar 30% dari total belanja daerah agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan, sementara belanja rutin harus dikendalikan agar tidak mendominasi anggaran.

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur belanja Kota Manado masih didominasi oleh belanja operasi, dengan rata-rata lebih dari 90% dari total anggaran selama periode 2018–2023, sedangkan belanja modal hanya berada pada kisaran 10–29%. Kondisi ini mencerminkan alokasi anggaran yang belum seimbang dan cenderung lebih banyak digunakan untuk konsumsi birokrasi. Menurut teori keuangan publik, tingginya porsi belanja rutin akan mengurangi ruang fiskal untuk investasi pembangunan jangka panjang, sehingga kualitas infrastruktur dan pelayanan publik berpotensi stagnan. Padahal, belanja modal memiliki dampak multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakseimbangan belanja ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya beban belanja pegawai, kurangnya perencanaan anggaran berbasis prioritas pembangunan, serta belum optimalnya pengelolaan sumber pendapatan daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada pembiayaan kegiatan operasional, sementara pembangunan infrastruktur dan investasi publik mendapatkan porsi yang lebih kecil.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan analisis rasio efektivitas, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado selama periode 2018–2023 berada pada kategori kurang efektif.
2. Berdasarkan analisis rasio efisiensi, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado selama periode 2018–2023 berada pada kategori tidak efisien.

3. Berdasarkan analisis kemandirian keuangan, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado selama periode 2018–2023 berada pada kategori kemandirian yang sangat rendah.
4. Berdasarkan analisis keserasian belanja daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado selama periode 2018–2023 menunjukkan proporsi belanja operasi yang sangat dominan yang tergolong kurang baik. Sementara itu, belanja modal yang tergolong cukup baik

DAFTAR PUSTAKA

- Insani, A., Rahayu, S., Erwati, M., & Jambi, U. (2023). *Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah*. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 109–125.
- Kapoh, L. E. C., Rotinsulu, D. Ch., & Maramis, M. Th. B. (2020). *Analisis kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah, 3, 88–98.
- Kaunang, C. E., Naukoko, A. T., & Londa, A. T. (2016). *Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: Studi pada Kota Manado (Tahun 2010–2014)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 02.
- Kuwatu, F. S. (2019). *Analisis laporan keuangan sektor publik*. Deepublish.
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). *Analisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2007–2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14(2).
- Maga, F. F., Tolosang, K., & Lapian, A. (2016). *Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(01).
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi ketiga). UPP STIM YKPN.
- Mangindaan, R. S., Masdjojo, G. N., & Ardriyati, W. (2016). *Analysis of regional financial performance of the District Government South Minahasa year 2012–2014 in the implementation of the regional autonomy*. International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics, 448–463.
- Marbun, R., Urip, T. P., & Indahyani, R. (2023). *Asymptotic significance test on financial performance in Papua Province government*. International Journal of Professional Business Review, 8(8), 1–24.
- Marwati, S., & Pratiwi, E. (2023). *Analisis kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 6(2), 58–66.
- Monalisa, M., & Indriasari, D. (2022). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan analisis pertumbuhan dan rasio keuangan*. Jurnal Syntax Admiration, 3(8), 1062–1071.
- Pangestu, K. D. (2022). *Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pematang Jaya*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). *Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2011–2015*. Jurnal Accountability, 06(01), 45–56.
- Rahmadani, R., & Rudini, A. (2023). *Analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2018–2021*. Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan, 2.

- Rampengan, M., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). *Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(03), 616–623.
- Saknosiwi, Y. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). *Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(03), 37–45.
- Sasana, H. (2011). *Analisis determinan belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18, 46–58.
- Silviana, M., Situngkir, A., & Asnida Nofianna, S. (2022). *Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Medan dengan rasio keuangan (tahun 2015–2019)*. JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan, 5(1).
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). *Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, 01(02), 114–114.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson.